

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan IV tahun 2024 Inflasi Kabupaten Sorong inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Sorong sebesar 3,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,24. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,03 persen;
2. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen;
3. Kelompok kesehatan sebesar 3,27 persen;
4. Kelompok Pendidikan sebesar 0,69 persen; dan
5. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 1,41 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu:

1. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,66 persen;
2. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,77 persen;
3. Kelompok transportasi sebesar 1,51 persen;
4. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen;
5. Kelompok rekreasi olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Sorong pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 0,25 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Sorong Triwulan IV tahun 2024 sebesar 1,49 persen.

Hasil pemantauan harga barang dan jasa selama Triwulan IV tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan/penurunan harga. Komoditas yang mengalami **kenaikan** harga antara lain daging ayam ras, Telur ayam ras, Bawang Merah, Cabai merah, cabai rawit, Bawang Putih dan Ikan Kembung. Komoditas yang mengalami **penurunan** antara lain udang dan Susu SGM. Perubahan Kenaikan dan Penurunan harga dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Perubahan kenaikan harga paling rendah adalah telur ayam ras sedangkan perubahan kenaikan harga paling tinggi adalah Bawang merah.
2. Perubahan penurunan harga paling rendah adalah susu SGM, sedangkan perubahan penurunan harga paling tinggi adalah Udang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dalam kelompok makanan berpengaruh terhadap angka inflasi
2. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi
3. Kurangnya produktivitas pangan, khususnya Bawang merah dan Bawang

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantauan harga di pasar tradisional secara rutin setiap hari dan minggu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Pemantauan harga tingkat petani dan peternak oleh Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas TPHBUN.

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA RATA-RATA			
			OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Beras	kg	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	
2	Daging ayam ras	kg	Rp 39.194	Rp 38.467	Rp 40.000	
3	Telur Ayam Ras	kg	Rp 34.000	Rp 34.000	Rp 34.000	
4	Bawang Merah	kg	Rp 39.355	Rp 39.500	Rp 48.387	
5	Cabai Merah	kg	Rp 51.613	Rp 43.333	Rp 48.871	
6	Cabai Rawit	kg	Rp 17.140	Rp 15.100	Rp 16.613	
7	Miripak Goreng Kemasan	kg	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	
8	Gula Pasir	kg	Rp 19.000	Rp 19.000	Rp 19.000	
9	Bawang Putih	kg	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	
10	Daging Sapi	kg	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
11	Tepung Terigu	kg	Rp 16.000	Rp 16.000	Rp 16.000	
12	Udang	kg	Rp 36.290	Rp 37.333	Rp 40.000	
13	Ikan Kembung	kg	Rp 36.290	Rp 37.333	Rp 40.000	
14	Mie Instan (Indomie)	bungkus	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 4.000	
15	Tempe	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
16	Tahu Mentah	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	
17	Pisang (Ananas Lokal)	kg	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	
18	Susu Bubuk, dancow vanila (400-500 gr)	doz	Rp 53.000	Rp 53.000	Rp 53.000	
19	Susu Bidi (Mentepening 100 ml)	kg	Rp 44.097	Rp 44.000	Rp 44.000	
20	Jeruk	Kg	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Operasi pasar belum dilakukan secara serentak dan terus

2. Penyediaan harga dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi sehingga menghasilkan satu data harga di tingkat konsumen (pasar tradisional) dan di tingkat produsen (petani).
3. Pelaksanaan inspeksi ke pasar Pemda agar intensif dilaksanakan oleh OPD terkait untuk memastikan kestabilan harga-harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penerapan digitalisasi transaksi harus terus digalakkan ditengah masyarakat dengan dimulai dari level pembuat kebijakan / ASN, untuk mempermudah pola transaksi dan mempermudah proses distribusi.
2. Diperlukan koordinasi antar stakeholder yang lebih kuat terhadap upaya stabilisasi harga dan pemenuhan permintaan barang kebutuhan pokok
3. Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait supaya dapat disinkronkan dengan hasil pemantauan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan selanjutnya dipublikasikan dalam media massa yang mudah diakses masyarakat